



# LAPORAN KINERJA (LKJ) 2019

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya, Dinas Perhubungan Aceh telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019. LKj pada tahun 2019 merupakan LKj yang disusun pada tahun kedua pelaksanaan RPJMA dan Renstra Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2017-2022, sehingga diharapkan juga dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan kedua dokumen perencanaan tersebut.

LKj Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa “Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Penyusunan/penyampaian Laporan Kinerja dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sebagai evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tahun dimaksud. Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) ini juga dimaksudkan sebagai Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada publik secara tidak langsung berpartisipasi mengadakan pengawasan secara optimal. Keberhasilan LKj ini juga menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat Dinas Perhubungan Aceh dalam melaksanakan Visi dan Misi Gubernur Aceh.

Melalui laporan ini, Dinas Perhubungan Aceh berharap dapat memberikan gambaran obyektif bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam pembangunan khususnya sektor transportasi.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan LKj Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2019 ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kemajuan Daerah Aceh.

Banda Aceh, 24 Februari 2020  
Kepala Dinas Perhubungan Aceh

**JUNAIDI, ST,MT**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP 19631231 199703 1 014**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan .....	2
1.3. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi .....	3
1.4. Struktur Organisasi .....	3
1.5. Sistematika Penyajian .....	8
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 .....	9
2.1.1. Visi Dan Misi .....	10
2.1.2. Tujuan Dan Sasaran .....	11
2.1.3. Strategi Dan Kebijakan .....	12
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	13
2.3. Penetapan Kinerja Tahunan 2019 .....	14
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	18
3.1.1. Memebandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 .....	20
3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir ..	27
3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra .....	35

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan .....	36
3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	39
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	40
3.2 Realisasi Anggaran .....	41
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
4.2. Kesimpulan .....	44
4.3. Upaya Di Masa Mendatang .....	45
<b>Lampiran .....</b>	<b>47</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pengukuran Kinerja 2019 .....	47
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	48
Lampiran 3. Penghargaan Tahun 2019 .....	49
Lampiran 4. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2019 .....	51
Lampiran 5. Penetapan Kinerja Tahun 2019 .....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service oleh karena itu agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good governance yang baik adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral tinggi . Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggara kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas perlemen, serta tersedianya akses sama pada informasi bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good governance) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintah yang transparan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa “Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Penyusunan/penyampaian Laporan Kinerja dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Banyak aspek yang akan mempengaruhi perencanaan sistem transportasi wilayah. integrasi pengembangan ruang kegiatan, kebutuhan lokasi simpul dan kebutuhan ruang lalu lintas sangat dibutuhkan dalam membangun atau merencanakan suatu sistem yang baik dan terpadu. Perencanaan dan pembangunan sistem transportasi yang baik akan memberikan pelayanan dan pengembangan ekonomi yang maksimal bagi suatu wilayah.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Aceh adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Aceh.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Aceh adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja serta memperbaiki kinerja dinas di masa yang akan datang.

## **1.3 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh, dijelaskan bahwa Dinas

Perhubungan merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Aceh di Bidang Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Aceh mempunyai Tugas pokok untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Perhubungan Aceh, mempunyai fungsi :

1. Penyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Aceh di Bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perhubungan transportasi orang dan barang antar kabupaten/kota di dalam wilayah Aceh;
3. Pelaksanaan penetapan kebijakan teknis, perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem transportasi wilayah Aceh;
4. Pelaksanaan pengendalian terhadap sektor pembangunan lain melalui pelayanan jasa perhubungan yang handal, berdaya saing, berkelanjutan dan memberi nilai tambah (ekonomi); dan
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan.

#### **1.4. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan data Kepegawaian sampai dengan akhir Tahun 2019, jumlah pegawai Dinas Perhubungan Aceh berjumlah 261 orang, terdiri dari 159 orang Pegawai Negeri Sipil dan 102 Orang Tenaga Kontrak.

Adapun perincian PNS Dinas Perhubungan Aceh menurut golongan ruang kepangkatan, jenjang pendidikan dan pendidikan penjenjangan (posisi Desember 2019), pada tabel I, II dan III di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan**

No	Golongan/Kepangkatan		Jumlah Pegawai
1.	Golongan I	I/c	-
		I/d	-
2.	Golongan II	II/a	3
		II/b	5
		II/c	19
		II/d	9
3.	Golongan III	III/a	20
		III/b	33
		III/c	24
		III/d	34
4.	Golongan IV	IV/a	10
		IV/b	-
		IV/c	2
		IV/d	-
<b>Jumlah Total</b>			<b>159</b>
<b>Pegawai Kontrak</b>			<b>102</b>

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	SD	1
2.	SLTP	-
3.	SMU	39
4.	D I	1
5.	Ahli Madya / D III	22
6.	D IV	4
7.	Sarjana / S1	68
8.	Pasca Sarjana / S2	23
9.	Doktoral / S3	0
<b>Jumlah</b>		<b>159</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Diklat PIM IV (ADUM)	21
2.	Diklat PIM III ( SPAMA)	7
3.	Diklat PIM II (SPAMEN)	2
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Aceh terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
  - Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
  - Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
  - Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
3. Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda, membawahi :
  - Seksi Penataan Sistem Transportasi dan Perkeretaapian
  - Seksi Tata Ruang Transportasi dan Lingkungan
  - Seksi Penelitian dan Pengembangan Teknolgi
4. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi:
  - Seksi Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan
  - Seksi Seksi Sarana dan Angkutan
  - Seksi Prasarana
5. Bidang Pelayaran, membawahi :
  - Seksi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan
  - Seksi Pengusahaan Pelabuhan dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran
  - Seksi Angkutan Pelayaran dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
6. Bidang Penerbangan, membawahi :

- Seksi Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara
- Seksi Keamanan Penerbangan
- Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Udara.

7. UPTD Penyelenggara Terminal Type B, membawahi :

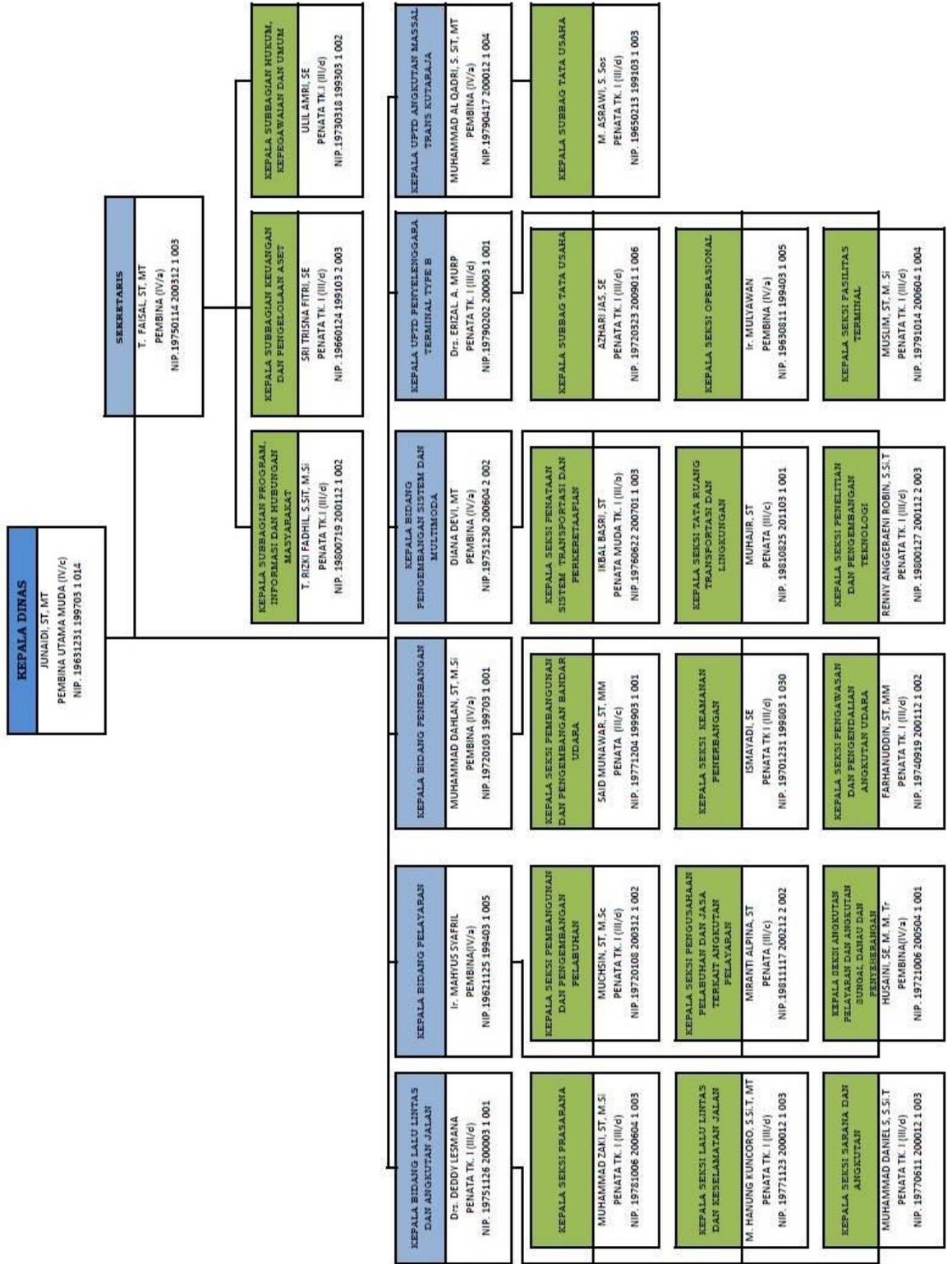
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Operasional
- Seksi Fasilitas Terminal

8. UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, membawahi :

- Sub Bagian Tata Usaha

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN ACEH**



## **1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Aceh selama satu tahun di tahun 2019. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

### **Kata Pengantar**

### **Daftar Isi**

#### **Bab I      Pendahuluan**

#### **Bab II     Perencanaan Kinerja**

#### **Bab III    Akuntabilitas Kinerja**

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

#### **BAB IV Penutup**

### **Lampiran**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 – 2022**

Perencanaan sebuah pembangunan melingkupi berbagai tahapan pelaksanaan, yaitu berawal dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Aceh, selanjutnya disebut Renstra Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan Renstra SKPD, dalam Pemerintah Aceh disebut Renstra SKPA, disusun berdasarkan amanah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra yang merupakan dokumen perencanaan SKPA periode 5 (lima) tahunan antara lain disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017 – 2022 dan sinkron dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.

Tahapan pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMA dimaksud, dijabarkan secara lebih terinci dalam pengembangan sektor Perhubungan. Di dalam Renstra Dinas Perhubungan Aceh secara terstruktur memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Perhubungan Aceh yang memiliki sasaran strategis dan ukuran pencapaian yang terukur.

Selanjutnya dokumen Renstra ini menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahunnya sampai dengan tahun 2022.

### 2.1.1. VISI DAN MISI

Adapun yang menjadi Visi Kepala Daerah yang menjadi dasar dalam pengembangan perencanaan pembangunan daerah Aceh, terkait dengan telaahan ini menyesuaikan Visi dan Misi Gubernur Aceh Terpilih 2017-2022. Visi Gubernur Aceh terpilih adalah *“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”*.

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 10 (sepuluh) misi pembangunan Aceh sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintah yang adil, bersih dan melayani;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljama'ah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional;
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi;
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan;
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *Evidence Based Planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Peran dan fungsi Dinas Perhubungan Aceh sesuai Visi dan misi tersebut di atas adalah menjadi bagian dari misi *‘Pembangunan dan peningkatan kualitas*

*infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan'* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk perencanaan, pengembangan dan pembangunan di sektor perhubungan.

Adapun output/outcome yang ingin dicapai di sektor perhubungan yaitu :

- 1) Porsentase prasarana, sarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar;
- 2) Meningkatnya persentase pelayanan angkutan;
- 3) Menurunnya kasus angka kecelakaan lalu lintas;
- 4) Meningkatnya persentase laik jalan angkutan umum.

### **2.1.2. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dari rencana kerja SKPA mengacu kepada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMA, yaitu sesuai dengan misi "*Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan*" dengan Tujuan : "Mengurangi ketimpangan antar wilayah", maka tujuan dari rencana kerja Dinas Perhubungan :

- a. Mengurangi ketimpangan antar wilayah;
- b. Pengelolaan terminal type B yang modern;
- c. Penyediaan angkutan umum perkotaan Kota Banda Aceh yang mampu memenuhi pergerakan;
- d. Mitigasi efek gas rumah kaca sektor energi subsector transportasi;
- e. Penyediaan kualitas pelayanan infrastruktur transportasi yang sesuai standar yang mendukung pariwisata dan mitigasi kebencanaan;
- f. Peningkatan keselamatan transportasi;
- g. Pengembangan sistem transportasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kawasan.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan RPJMA yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Perhubungan adalah “Meningkatnya konektivitas antar wilayah”, maka sasaran pembangunan transportasi Aceh adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan/perbaikan jaringan infrastruktur dan jaringan pelayanan yang menghubungkan wilayah kepulauan dan Kawasan;
- b. Terwujudnya peningkatan fasilitas dan pelayanan terminal type B;
- c. Terwujudnya peningkatan pelayanan transportasi Transkoetaradja yang diselenggarakan secara mandiri;
- d. Terwujudnya penurunan tingkat emisi gas rumah kaca dari sektor energi subsektor transport;
- e. Terwujudnya infrastruktur transportasi yang sesuai standar pelayanan (Komite FAL);
- f. Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi;
- g. Fasilitas cargo perikanan Bandara Maimun Saleh – Sabang;
- h. Fasilitas terminal penyeberangan Internasional di Pelabuhan Kuala Langsa;
- i. Terwujudnya peningkatan/perbaikan jaringan infrastruktur dan jaringan pelayanan angkutan sungai yang menghubungkan Kawasan terpencil (Angkutan Sungai Muara Situlen – Gelombang – Singkil);
- j. Terbangunnya kereta api perkotaan Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

### **2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Adapun strategi yang digunakan untuk menjabarkan visi dan misi Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan adalah “Peningkatan dan pengembangan konektivitas perhubungan laut, darat dan udara” dengan arah kebijakan “Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana transportasi”. Hal ini ditempuh Dinas Perhubungan Aceh dengan strategi sebagai berikut :

- a. Penggunaan teknologi informasi, skema pembiayaan yang melibatkan sektor swasta;
- b. Penetapan kejelasan aset dan kewenangan;
- c. Kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Kelembagaan pengelolaan transportasi yang adil berdasarkan zona pengembangan;
- e. Penggunaan teknologi informasi, skema pembiayaan yang melibatkan sektor swasta;
- f. Revitalisasi perkeretaapian Aceh Lintas Timur;
- g. Penciptaan angkutan massal perkotaan;
- h. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah terhadap Emisi Gas Rumah Kaca;
- i. Pemenuhan standar minimal terhadap prasarana dan fasilitas keselamatan;

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran di atas melalui :

- a. Membangun konektivitas transportasi antar wilayah;
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan;
- c. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang berkeadilan;
- d. Kualitas infrastruktur dan pelayanan memenuhi standar sesuai Keputusan Menteri;
- e. Angkutan Transkoetaradja menuju Badan Layanan Umum;
- f. Transportasi ramah lingkungan;
- g. Kualitas pelayanan infrastruktur yang aman, nyaman dan handal;
- h. Keselamatan transportasi menuju *Zero Accident*;

## **2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dinas Perhubungan Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis Dinas. Penetapan

IKU sesuai dengan tupoksi dan Standar Pelayanan Minimum. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Aceh :

- a. Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, warning light, delineator, dan guardrail);
- b. Persentase Peningkatan arus penumpang.

### 2.3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 dengan mempedomani Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1.**  
**Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi	Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, warning light, delineator, dan guardrail)	70 %
2	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	Persentase peningkatan arus barang dan penumpang	2,60 %

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi, Dinas Perhubungan Aceh telah menetapkan Penetapan

Kinerja (Tapkin) tahun 2019 sebagai wujud dari perjanjian kinerja dan akan dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran.

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran.

**Tabel 2.2.**  
**Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi	Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, warning light, delineator, dan guardrail)	70%	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS</b> 1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 2. Pengadaan Marka Jalan 3. Pengadaan Pagar Pengaman 4. Pengadaan Deliniator 5. Pengadaan Traffic Light 6. Pembangunan Zona Keselamatan Lalu Lintas 7. Pengadaan Cermin Tikungan 8. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan pada Daerah Rawan	<b>38.130.107.378</b> 10.423.718.728 2.234.606.208 14.665.240.999 996.249.000 2.611.897.841 774.490.200 3.126.416.503 3297487899
2.	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	Persentase peningkatan arus barang dan penumpang	2,60%	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</b> 1. Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 2. Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut 3. Pembangunan Sarana 4. Pembangunan Prasarana Perhubungan Udara 5. Monitoring, Evaluasi dan 6. Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat 7. Perhubungan Darat 8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan 9. Penyusunan Regulasi Bidang Perhubungan 10. Pembangunan Sarana Perhubungan Udara  <b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b> 1. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa 3. Peningkatan Disiplin Angkutan	<b>184.467.221.830</b> 15.847.798.500 28.028.072.340 94.242.698.000 5.391.965.950 1.632.535.000 8.314.780.000 28.524.518.140 1.087.183.900 922.320.000 475.350.000  <b>6.264.786.000</b> 2.699.656.000 1.050.000.000 2.515.130.000

**Program**

**Anggaran (Rp)**

1. <b>PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</b>	184.467.221.830
2. <b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>	6.264.786.000
3. <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS</b>	38.130.107.378

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam rencana kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Aceh memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja Dinas Perhubungan Aceh dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, melalui standar pengukuran antara objek yang akan diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah program, kegiatan, tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan searah dengan berbagai perencanaan dan target yang telah ditetapkan melalui pengukuran capaian kinerja.

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*), berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi baik terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Laporan Kinerja Tahunan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Untuk mempermudah penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

No.	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Aceh meliputi pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan.

Dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Perhubungan Aceh mengukur tingkat capaian target kinerja dengan 2 (indikator kinerja) yang telah ditetapkan, adapun pengukuran sasaran strategis dan indikator kerjanya yang dicapai berdasarkan realisasi tahun 2019 yaitu :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi	Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, warning light, delineator, dan guardrail)	70 %	67,22 %	96 %
2.	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	Persentase peningkatan arus barang dan penumpang	2,60 %	11,60 %	446 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Rata-rata capaian kinerja Dinas Perhubungan Aceh tergolong **Baik**, ini dapat dilihat dari penilaian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis sebagian sudah tercapai bahkan sudah jauh melampaui target capaian kinerja yang ditetapkan.

**Sasaran 1** sesuai tabel diatas realisasinya tergolong masih **kurang** dikarenakan belum mencapai target yang ditetapkan 70 %, dan realisasinya 67,22 % atau dengan capaian kinerja 96 %. Faktor ini dikarenakan fasilitas keselamatan jalan terjadi penyusutan 15% dan khusus untuk marka terjadi penyusutan sampai 60%.

**Sasaran 2** sesuai tabel diatas realisasinya tergolong **Sangat Baik** karena telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 2,60 % dan realisasinya sebesar 11,60 % atau dengan capaian kinerja 446 %, faktor terjadi peningkatan pada pada bagasi/kargo, terutama pada Bandara Sultan Iskandar Muda. Ini banyak dipengaruhi oleh maraknya situs belanja online dengan pengiriman barang melalui bandara Sultan Iskandar Muda.

### 3.1.1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

#### A. Sasaran Strategis 1

Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi

**Tabel 3.3**  
Pengukuran Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi	Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, warning light, delineator, dan guardrail)	70 %	67,22 %	96%

Seperti terlihat pada trend capaian kinerja sasaran 1 pada Gambar 3.1 dibawah ini :



Gambar 3.1. Trend Capaian Kinerja Sasaran 1

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

## Indikator 1

### **Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, warning light, delineator, dan guardrail)**

Dari pengukuran indikator kinerja terhadap sasaran strategis 1 Dinas Perhubungan Aceh tahun 2019 ini belum mencapai target capaian kinerja, hal ini disebabkan karena fasilitas keselamatan jalan yang terpasang terjadi penyusutan dalam kurun waktu 2 sampai dengan 5 tahun, sedangkan marka jalan dengan umur ekonomis/masa pakai 2 tahun.

**Tabel 3.4**  
**Formulasi/Cara Pengukuran Sasaran 1**

Ideal kebutuhan faskes 100%							Total IDEAL gabungan
Ket	Panjang Jalan Prov (KM) = a	Rambu (6a)	RPPJ (0,6a)	Deli (12a)	Guardrail (5a) = Beam	Marka (125a= Modul)	
<b>IDEAL</b>	<b>1.781,72</b>	<b>10.690</b>	<b>1.069</b>	<b>21.381</b>	<b>8.909</b>	<b>222.715</b>	<b>264.764</b>
2014-2018		10.662	284	10.920	991	358.622	381.479
% Terpasang Terhadap IDEAL		99,74%	26,57%	51,07%	11,12%	161,02%	
15% x Tahun Terpasang (Kecuali Marka dengan penyusutan 60%)		1.599	43	1.638	149	215.173	
Asumsi Sisa Terpasang		9.063	241	9.282	842	143.449	
<b>REAL 2019</b>		<b>2.116</b>	<b>46</b>	<b>1.670</b>	<b>177</b>	<b>11.101</b>	
<b>TRPASANG S/D 2019</b>		<b>11.179</b>	<b>287</b>	<b>10.952</b>	<b>1.019</b>	<b>154.549</b>	<b>177.987</b>
<b>Persentase Terpasang s.d Tahun 2019</b>		<b>104,57%</b>	<b>26,88%</b>	<b>51,22%</b>	<b>11,44%</b>	<b>69,39%</b>	<b>67,22%</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data

#### a. Marka

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Penyusutan marka jalan dikarenakan faktor umur teknis paling lama 2 (dua) tahun sesuai dengan PM.34 Tahun 2014 pasal 77 ayat 2.

Umur Teknis marka paling lama adalah 2 (dua) tahun, maka perlu pemeliharaan dengan cara berkala dan insidental. Pemeliharaan berkala dengan cara mengganti marka jalan yang rusak dengan yang baru untuk dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pengguna jalan, sedangkan pemeliharaan insidental meliputi melakukan pemantauan terhadap unjuk kerja Marka Jalan dan penggantian bila tidak sesuai dengan fungsinya serta melakukan penentuan dan penetapan jenis dan jumlah Marka Jalan yang memerlukan pemeliharaan dan perbaikan.

Penghapusan Marka jalan ditentukan berdasarkan umur teknis, kebijakan pengaturan lalu lintas dan keberadaan fisik marka.

Volume lalu lintas yang tinggi menjadi penyebab utama keausan dari cat marka, dibandingkan dengan faktor lingkungan yang diukur yaitu temperatur diatas permukaan perkerasan yang rata-rata masih di bawah titik leleh dari aspal pada perkerasan jalan. Faktor penyusutan marka jalan terjadi dengan seiringnya waktu berjalan, seperti cat marka yang sudah tidak tampak lagi pada jalan akibat keausan oleh kendaraan yang melintasinya dan faktor pemuatan.

Ideal kebutuhan Marka sesuai panjang jalan Provinsi adalah sebesar 225.715 M', realisasi total keseluruhan Marka yang terpasang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah 369.723 M' dan setelah terjadi penyusutan 60%, sisa marka yang terpasang adalah 154.549 M' atau sebesar 69,39 %.

b. Rambu

Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan. Penyusutan dikarenakan faktor umur

teknis rambu paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan PM.13 Tahun 2014 pasal 68 ayat 2.

Ideal kebutuhan rambu terpasang sesuai panjang jalan Provinsi adalah sebesar 10.690 buah, realisasi total keseluruhan rambu yang terpasang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 12.778 buah dan setelah terjadi penyusutan 15%, sisa Rambu yang terpasang sebanyak 11.179 buah.

c. RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan)

Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan adalah rambu lalu lintas yang dipersiapkan untuk memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi atau pemakai jalan lainnya, tentang arah yang harus ditempuh atau letak kota yang akan dituju, rambu RPPJ dibuat lengkap dengan nama dan arah letak itu berada.

Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas diperlukan pedoman pengguna fasilitas perlengkapan jalan berupa alat pengendali dan pengamanan bagi pengguna jalan.

Ideal kebutuhan RPPJ terpasang sesuai panjang jalan Provinsi adalah sebesar 1.069 buah, realisasi total keseluruhan RPPJ yang terpasang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 330 Set dan setelah terjadi penyusutan 15%, sisa RPPJ yang terpasang sebanyak 280 Set.

d. Deliniator

Patok Lalu Lintas (*Delineator*) ini merupakan suatu unit konstruksi yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif). Fungsinya untuk menandai batas jalan dan membantu pengguna jalan mengetahui alinyemen jalan di depan dan sebagai pengarah serta sebagai peringatan bagi pengemudi pada waktu malam hari. Pengemudi bisa terbantu dengan adanya rambu ini. Reflector yang tersemat pada

delineator ini bisa menjadi acuan otolovers agar tak kebablasan keluar jalur. Terlebih saat malam hari dengan kondisi yang gelap.

Penyusutan deliniator dikarenakan faktor umur teknis paling lama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan PM.82 Tahun 2018 pasal 57 ayat 2.

Ideal kebutuhan Deliniator terpasang sesuai panjang jalan Provinsi adalah sebesar 21.381 buah, realisasi total keseluruhan Deliniator yang terpasang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah 12.590 dan setelah terjadi penyusutan 15%, sisa Deliniator yang terpasang sebanyak 10.952 buah atau sebesar 51,22 %.

#### e. Guardrail

Pagar Pengaman (*Guardrail*) adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan agar tidak keluar dari jalur lalu lintas. Pagar Pengaman dipasang pada lokasi jurang atau lereng, tikungan pada bagian luar jalan, ruang milik jalan (rumija) yang terdapat bangunan struktur di sisi bahu jalan seperti pilar jembatan, tiang lampu, atau bangunan lain yang berpotensi membahayakan.

Keberadaan fisik pagar pengaman jalan (*guardrail*) dan deliniator dapat diganti atau dipasang baru karena faktor kerusakan dan hilang. Banyak disebabkan oleh faktor kecelakaan lalu lintas yang berakibat kerusakan pada pagar pengaman jalan (*guardrail*) dan deliniator.

Ideal kebutuhan *Guardrail* terpasang sesuai panjang jalan Provinsi adalah sebesar 8.909 M, realisasi total keseluruhan *Guardrail* yang terpasang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah 1.168 M dan setelah terjadi penyusutan 15%, sisa Deliniator yang terpasang sebanyak sebanyak 1.019 M atau sebesar 11,44 %.

Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi memegang peranan penting di dalam menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi darat guna mewujudkan transportasi yang andal, aman, nyaman dan efektif dan juga banyaknya persimpangan yang merupakan pertemuan arus lalu lintas dari beberapa arah turut memberikan kontribusi pada kemacetan lalu lintas yang ada sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.

## B. Sasaran Strategis 2

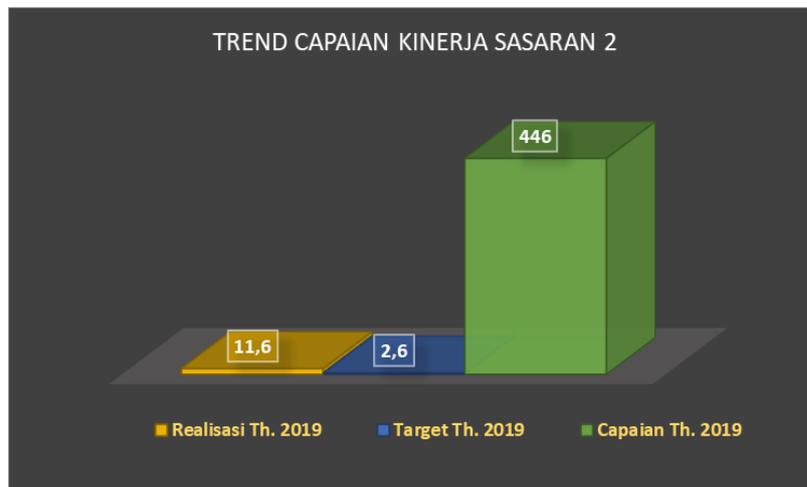
### Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi

**Tabel 3.5**  
**Pengukuran Kinerja Sasaran 2**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2.	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	Persentase peningkatan arus barang dan penumpang	2,60 %	11,60 %	446 %

Dari pengukuran indikator kinerja terhadap sasaran strategis 2 Dinas Perhubungan Aceh tahun 2019 sudah melampaui target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan sebesar 2,60% dan yang terealisasi sebesar 11,60 % atau dengan capaian kinerja sebesar 446 %. Hal tersebut dikarenakan terjadi lonjakan pada jumlah arus barang dan penumpang.

Seperti terlihat pada trend capaian kinerja sasaran 1 pada Gambar 3.1 dibawah ini :



Gambar 3.1. Trend Capaian Kinerja Sasaran 2

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

## **Indikator 2**

### **Persentase peningkatan arus barang dan penumpang**

Peningkatan arus barang dan penumpang ini disebabkan tersebut dikarenakan jumlah arus barang dan penumpang terjadi kenaikan.

#### **a. Bandara**

Jumlah penumpang terbesar yang menggunakan jasa transportasi pesawat melalui Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar rata-rata terjadi pada bulan Juli.

Kenaikan jumlah penumpang pada bulan Juli ini disebabkan faktor liburan anak sekolah. Namun, jika dibandingkan *year on year*, jumlah ini mengalami penurunan.

#### b. Penyeberangan

Faktor terjadi kenaikan penumpang dikarenakan banyaknya event-event yang diselenggarakan di Sabang selama tahun 2019 seperti : Adat Laut, Lomba Perahu, dan Atraksi Seni; Sabang Marine Festival; Festival Budaya Etnik Serumpun; Aceh International Diving Festival; Sabang International Freediving Championship; Expo Produk Kreatifitas daerah pesisir; Pentas Pesona Budaya Tradisi Pesisir dan masih banyak lainnya.

#### c. Terminal

Jumlah penumpang angkutan darat ini mengalami penurunan 6 %. Penurunan jumlah penumpang disebabkan karena semakin banyaknya orang yang berpindah ke sejumlah moda lain dan penggunaan kendaraan pribadi. Pertumbuhan pengguna kendaraan pribadi mengakibatkan jumlah penumpang angkutan darat turun drastis. Persebaran penumpang di moda lain bertumbuh, sedangkan di angkutan darat minus.

Ada beberapa terminal di Tahun 2018 yang memang tidak beroperasi, sehingga tidak adanya data penumpang, karena mobil tidak masuk terminal, tetapi di Tahun 2019 sudah mulai beroperasi seperti Terminal Pidie Jaya, Terminal Bireun dan Terminal Subulussalam, sehingga adanya aktivitas di beberapa terminal tersebut.

### **3.1.2 MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR**

Dengan membandingkan kondisi antara tahun sekarang dengan beberapa tahun sebelumnya dapat terlihat perbandingan capaian kinerja yang naik dan yang turun. Seperti diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian Kinerja		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi	Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, warning light, delineator, dan guardrail)	59,33	69,65	67,22	96,03 %	99,5 %	96 %
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	Persentase peningkatan arus barang dan penumpang	2,28	3,55	11,60	95,08 %	137 %	446 %

Berdasarkan tabel tersebut, jika dilihat dari sasaran strategis perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2017, 2018 dan 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. **Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, warning light, delineator, dan guardrail)**

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran 1**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian Kinerja		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi	Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, warning light, delineator, dan guardrail)	59,33	69,65	67,22	96,03 %	99,5 %	96 %

Perbandingan realisasi dari indikator Persentase Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (Marka, Rambu, Warning Light, Deliniator dan Guardrail) dari tahun ke tahun semakin meningkat, walaupun kebutuhan fasilitas keselamatan jalan ini tidak pernah habis, tetapi ada umur masa pakai paling lama 2 sampai 5 tahun. Seperti diperlihatkan pada tabel di berikut ini :

**Tabel 3.8**  
**Tabel Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan**

Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang								
Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
Rambu Lalu Lintas	840	Set	Rambu Lalu Lintas	5.124	Set	Rambu Lalu Lintas	2.116	Buah
Paku Marka Glass Eye	7.872	Set	Paku Marka Glass Eye	4.208	Set	Rambu Tiang Ganda	-	
Paku Marka Solar Cell	1.409	Set	Paku Marka Solar Cell	748	Set	Paku Marka Glass Eye	1.553	Buah
Marka Jalan	35.717	M'	RPPJ	131	Set	Paku Marka Solar Cell	646	Buah
Colour Pavement (Cold Plastik)	7.376	M'	Marka Jalan	100.436	M'	RPPJ	46	Buah
Rolling Guadrail	56	Set	Rolling Guadrail	220	Set	Marka Jalan	33.302	M'
Pagar Pengaman Jalan	88	M'	Pagar Pengaman Jalan	1.680	M'	Rolling Guadrail	2.626 Bola (1527,5 M)	Buah / M
Delineator	725	Set	Delineator	3.160	Set	Pagar Pengaman Jalan	708	M
Zoss	2	Lok	Zoss	5	Lokasi	Delineator	1.670	Buah
Warning Light	-	Lok	Warning Light	5	Lokasi	Zoss	4	Lok
Traffic Light	5	Lok	Traffic Light	7	Lokasi	Warning Light	-	-
Cermin Cembung	30	Set	Cermin Cembung	360	Set	Traffic Light	5	Lokasi
LPJU	15	Set	LPJU	-	Set	Pemeliharaan Traffic Light	3 simpang (Sp. Makam Pahlawan, Sp. Methodis, Sp. 4 kantor Bupati Abdya)	Lokasi
Speed Bump	411	Set	Speed Bump	-	Set	Cermin Cembung	416	Buah
						LPJU	106	Set
						Speed Bump	487	Set

Sumber : Data Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Aceh

a. Marka

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa ada peningkatan dalam pemasangan marka dari tahun 2017 sepanjang 35.717 M' dan di tahun 2018 meningkat menjadi 100.436 M', tetapi terjadi penurunan di tahun 2019 menjadi 33.302 M'.

b. Rambu

Rambu yang terpasang di Tahun 2017 sebanyak 840 buah, dan di Tahun 2018 meningkat menjadi 5.124 buah, sedangkan di Tahun 2019 menurun menjadi 2.116 buah.

c. RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan)

Tidak ada pemasangan RPPJ di Tahun 2017, tetapi di Tahun 2018 sebesar 131 Set dan di Tahun 2019 menurun menjadi 46 Set.

d. Deliniator

Pemasangan Deliniator di Tahun 2017 sebanyak 725 Set, dan melonjak naik di Tahun 2018 menjadi 3.160 Set, sedangkan di Tahun 2019 menurun menjadi 1.670 Buah.

e. Guardrail

Pemasangan Guardrail di Tahun 2017 sepanjang 88 M', dan terjadi kenaikan di Tahun 2018 sepanjang 1.680 M, tetapi terjadi penurunan di Tahun 2019.

**b. Persentase Peningkatan Arus Barang Dan Penumpang**

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran 2**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian Kinerja		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	Persentase peningkatan arus barang dan penumpang	2,28	3,55	11,60	95,08 %	137 %	446 %

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi dan capaian kinerja dari tahun ke tahun semakin meningkat. Realisasi tahun 2017 sebesar 2,28 dan di tahun 2018 meningkat menjadi 3,55 atau sebesar 56 %, sedangkan dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 meningkat menjadi 11,60.

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Jumlah Arus Penumpang Tahun 2018 – 2019**

NO	LOKASI	TAHUN 2018			TAHUN 2019				
		ARUS (Frek)	BARANG (Kg)	PENUMPANG (org)	ARUS (Frek)	BARANG (Kg)	PENUMPANG (org)		
1	BANDARA	13.667	5.579.440	1.310.898	12.807	7.574.793	1.303.715		
2	PENYEBERANGAN	5.561	87.263	1.778.658	5.364	79.366	1.914.470		
3	TERMINAL	679.467		2.140.197	661.624	-	1.689.953		
TOTAL		698.695	5.666.703	5.229.753	679.795	7.654.159	4.908.138		
		3.865.050			4.414.031				
Kenaikan dari Th. 2018 ke Th. 2019					-	2,71	35,07	-	6,15

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Pada tahun 2018 arus barang dan penumpang sebesar 3.865.050 dan di tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 4.414.031 atau naik sekitar 6,15 %.

Sedangkan jumlah penumpang mengalami penurunan terutama pada penumpang Bandara yang dari Tahun 2018 sebanyak 1.310.898 Orang menjadi 1.303.715 orang penumpang di Tahun 2019 atau penurunan sekitar 0,5 % dari tahun sebelumnya.

Tetapi dari segi barang/bagasi naik dari Tahun 2018 sebesar 5.579.440 dan di Tahun 2019 naik menjadi 7.574.793 atau sekitar 35,07 %.

Jumlah penumpang yang melalui terminal type A dan terminal type B di Tahun 2018 sebanyak 2.140.197 orang, sedangkan di Tahun 2019 menurun menjadi 1.689.953 atau turun 21 %.

a. Bandara

Penumpang terbesar pada bulan juli tahun 2018 sebanyak 115.841 orang penumpang, sedangkan di tahun 2019 sebanyak 102.361 orang. Kenaikan jumlah penumpang pada bulan Juli ini disebabkan faktor liburan anak sekolah. Namun, jika dibandingkan *year on year*, jumlah ini mengalami penurunan 11,64 %. Perbandingan

Tahun 2018 dengan Tahun 2019 Bandara Sultan Iskandar Muda seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.11**  
**Komparasi Pergerakan Pesawat dan Penumpang Tahun 2018 - 2019**  
**Bandara Sultan Iskandar Muda**

BULAN	PESAWAT		GROWTH 2018-2019	PENUMPANG		GROWTH 2018-2019
	2018	2019		2018	2.019	%
JAN	923	736	-20,26%	114.368	94.514	-17,36%
FEB	885	783	-11,53%	104.646	96.212	-8,06%
MAR	958	814	-15,03%	113.619	98.914	-12,94%
APR	929	741	-20,24%	110.852	89.200	-19,53%
MEI	828	703	-15,10%	98.582	69.670	-29,33%
JUN	773	732	-5,30%	98.246	82.458	-16,07%
<b>JUL</b>	<b>861</b>	<b>812</b>	<b>-5,69%</b>	<b>115.841</b>	<b>102.361</b>	<b>-11,64%</b>
AUG	863	778	-9,85%	107.747	91.491	-15,09%
SEP	856	801	-6,43%	101.749	87.907	-13,60%
OKT	881	871	-1,14%	105.542	97.741	-7,39%
NOP	846	777	-8,16%	99.856	99.486	-0,37%
DES	907	731	-19,40%	100.374	93.716	-6,63%
<b>TOTAL</b>	<b>10.510</b>	<b>9.279</b>	<b>-11,71%</b>	<b>1.271.422</b>	<b>1.103.670</b>	<b>-13,19%</b>

Sumber : Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Aceh

Kenaikan jumlah penumpang yang terjadi di Bandara masih dikatakan standar, dikarenakan seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa lonjakan penumpang masih didominasi pada musim Haji, Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Traveling dengan menggunakan pesawat tampaknya masih menjadi opsi utama bagi traveler yang ingin bepergian jauh.

b. Penyeberangan

Memasuki tahun baru 2020, jumlah penumpang Kapal Cepat di Pelabuhan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh tujuan Pelabuhan Balohan Sabang, Aceh mengalami

peningkatan hingga 50 persen dari hari biasanya. Lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel perbandingan di bawah ini :

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Jumlah Penumpang Penyeberangan**  
**Tahun 2018 - 2019**

PELABUHAN LAUT/ PENYEBERANGAN	TAHUN 2018			TAHUN 2019			PERSENTASE
	JUMLAH TRIP	JUMLAH PENUMPANG	BARANG	JUMLAH TRIP	JUMLAH PENUMPANG	BARANG	
Kapal Roro (Ulele-Balohan)	1.997	837.310	36.368	2.025	911.966	36.262	9%
Kapal Roro (Ulele-LAmteng)	478	6.766	270	472	7.824	221	16%
Kapal Cepat (Ulel-Balohan)	2.232	778.264	-	1.948	838.866	-	8%
SINABANG-L. HAJI	219	98.560	26.913	237	79.986	26.423	-19%
SINABANG-SINGKIL	134	22.906	19.971	102	21.624	12.176	-6%
SINGKIL-P.BANYAK	175	12.902	-	205	19.758	-	53%
SINGKIL-G.SITOLI	172	9.170	-	193	16.504	-	80%
SINABANG-MEULABOH	154	12.780	3.741	182	17.942	4.284	40%
<b>TOTAL</b>	<b>5.561</b>	<b>1.778.658</b>	<b>87.263</b>	<b>5.364</b>	<b>1.914.470</b>	<b>79.366</b>	<b>8%</b>

Sumber : Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Aceh

Tahun 2018 jumlah penumpang Kapal Cepat sebanyak 778.264 orang, sedangkan di tahun 2019 jumlah penumpang mencapai 838.866 orang atau sekitar 8 %. Akibat meningkatnya jumlah penumpang, PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Persero sudah menambah rute penyeberangan, baik kapal lambat maupun cepat. Sedangkan untuk penumpang kapal lambat di Tahun 2018 sebanyak 837.310 orang, dan di Tahun 2019 sebanyak 911.966 atau naik sekitar 9 %.

Jumlah penumpang angkutan penyeberangan di Tahun 2018 sebesar 1.778.658 orang, dan di Tahun 2019 terjadi kenaikan penumpang sebesar 1.914.470 orang atau sebesar 7,63 %

c. Terminal

Jumlah penumpang angkutan darat ini mengalami penurunan 6,15 % dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 ini.

**Tabel 3.13**  
Perbandingan Jumlah Penumpang Angkutan Darat  
Tahun 2018 - 2019

TERMINAL	JUMLAH PENUMPANG		Persentase 2018 - 2019
	2018	2019	
PIDIE	37.846	29.792	-45%
PIDIE JAYA		36.334	
BIREUEN		266.492	
KUALA SIMPANG	124.196	115.765	-60%
ABDYA	39.893	44.473	-34%
SUBULUSSALAM		1.974	
ACEH SINGKIL	10.267	2.088	-90%
Batoh	578.989	610.618	-40%
Lhokseumawe	256.286	261.465	-49%
Langsa	167.503	313.155	5%
<b>TOTAL</b>	<b>1.214.980</b>	<b>1.682.156</b>	<b>38%</b>

Sumber : UPTD Terminal

Sedangkan untuk angkutan lebaran sendiri terjadi peningkatan dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 sebesar 22 %, seperti yang diperlihatkan di tabel di bawah ini :

**Tabel 3.14**  
Persentase Jumlah Angkutan Lebaran Tahun 2018 & 2019

Jumlah Penumpang	2018	2019	Persentase Peningkatan Th. 2018 - 2019
Datang	2.493	3.327	33%
Berangkat	3.885	4.470	15%
<b>Total</b>	<b>6.378</b>	<b>7.797</b>	<b>22%</b>

Sumber : UPTD Terminal

**3.1.3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA**

**Tabel 3.15**  
**Target Capaian Kinerja Sesuai Dengan RPJMA**  
**Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2017-2022**

No	Layanan Urusan Wajib Non Dasar	Satuan	Target Capaian						Ket.
			Kondisi Awal	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah arus angkutan umum	Trayek/Frek							
a	Angkutan Darat	Trayek	3.796	3.887	3.969	4.058	4.158	4.239	
b	Angkutan Laut	Frek	3.474	3.468	3.830	4.022	4.223	4.434	
c	Angkutan Udara	Frek	11.479	12.627	13.890	15.279	16.806	18.487	
2	Rasio ijin trayek	Indeks	1:1343	1:1363	1:1360	1:1355	1:1346	1:1344	
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	28.238	45.887	64.241	89.938	125.913	176.279	
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit							
a	Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	11	11	11	11	11	11	
b	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	Unit	8	8	8	8	8	8	
c	Jumlah Bandar Udara	Unit	12	12	12	12	12	12	
d	Jumlah Terminal Tipe A	Unit	4	5	5	5	5	5	
e	Jumlah Terminal Tipe B	Unit	9	9	9	9	9	9	
f	Jumlah Terminal Tipe C	Unit	23	23	23	23	23	23	
g	Jumlah Terminal Tipe B yang Fungsional	%	56	78	89	100	100	100	
5	Persentase layanan angkutan darat	%	74,36	73,89	74,13	74,51	74,29	74,33	
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	13,46	21,74	30,35	42,36	59,13	80,37	
7	Pemasangan Rambu-rambu	%	65,00	70	76	81	87	92	
8	Rasio panjang jalan provinsi per jumlah kendaraan	Rasio Index	1,02	0,86	0,79	0,72	0,66	0,60	
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang							
a	Angkutan Darat	Orang	13.681.744	13.994.146	14.394.773	14.670.866	14.954.706	15.291.277	
b	Angkutan Laut	Orang	593.114	620.201	651.211	683.772	717.961	753.859	
c	Angkutan Udara	Orang	508.188	559.007	614.907	676.398	744.038	818.442	
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Orang							
a	Terminal	Orang	4.442.592	4.897.951	5.182.118	5.281.512	5.533.241	5.657.772	
b	Bandara	Orang	1.159.881	1.275.869	1.403.456	1.543.802	1.698.182	1.868.000	
c	Dermaga	Orang	1.267.916	1.217.868	1.278.761	1.342.699	1.409.834	1.480.326	
11	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Kasus	3.006	2.300	2.100	1.900	1.700	1.500	

Sumber : RPJMA 2017-2022

### **3.1.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan Provinsi yaitu :

1. Fasilitas keselamatan jalan yang terpasang terjadi penyusutan dalam kurun waktu 2 sampai dengan 5 tahun, sedangkan marka jalan dengan umur ekonomis/masa pakai 2 tahun.
2. Komponen fasilitas keselamatan (daun rambu, reflektor dan lain-lain) hilang dicuri atau dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
3. Kerusakan patok pengaman jalan selain karena faktor usia juga karena ulah/iseng orang-orang yang tak bertanggung jawab.
4. Banyak disebabkan oleh faktor kecelakaan lalu lintas yang berakibat kerusakan pada pagar pengaman jalan (guardrail) dan deliniator.

Upaya pemecahan guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Umur Teknis marka paling lama adalah 2 (dua) tahun, maka perlu pemeliharaan dengan cara berkala dan insidental.
2. Penghapusan Marka jalan ditentukan berdasarkan umur teknis, kebijakan pengaturan lalu lintas dan keberadaan fisik marka.
3. Keberadaan fisik rambu lalu lintas dapat diganti atau dipasang baru karena faktor kerusakan dan hilang.
4. Keberadaan fisik pagar pengaman jalan (guardrail) dan deliniator dapat diganti atau dipasang baru karena faktor kerusakan dan hilang.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi yaitu :

1. Bandara

- Fenomena peningkatan harga tiket penerbangan hingga saat ini telah menjadi asumsi dasar mengapa terjadinya penurunan penumpang angkutan udara.
- Faktor keamanan dan keselamatan penumpang sangat mempengaruhi pertimbangan responden untuk memilih moda angkutan udara.

2. Penyeberangan

- Faktor terjadi kenaikan penumpang dikarenakan banyaknya event-event yang diselenggarakan di Sabang selama tahun 2019 seperti : Adat Laut, Lomba Perahu, dan Atraksi Seni; Sabang Marine Festival; Festival Budaya Etnik Serumpun; Aceh International Diving Festival; Sabang International Freediving Championship; Expo Produk Kreatifitas daerah pesisir; Pentas Pesona Budaya Tradisi Pesisir dan masih banyak lainnya.
- Kurangnya jumlah kapal yang melayani rute Sabang.

3. Terminal

- Trayek angkutan sudah kurang menyentuh kebutuhan masyarakat.
- Ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan termasuk pengemudi dan fisik kendaraan yang sangat tinggi.
- Banyak bermunculan alternatif angkutan jenis lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik sehingga angkutan umum yang ada mulai ditinggal penumpangnya.
- Kondisi fisik kendaraan, seperti umur kendaraan, sudah tidak layak jalan. Ini juga karena tidak ada kemampuan pengusaha untuk melakukan peremajaan.

Upaya pemecahan guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah :

#### 1. Bandara

- Untuk mengantisipasi penurunan jumlah penumpang bisa dengan memberikan promosi (harga tiket diskon pada bulan-bulan tertentu atau pada saat ulang tahun maskapai penerbangan), pelayanan dan kenyamanan, keamanan dan keselamatan, waktu perjalanan dan referensi dari kelompok mempengaruhi keputusan penumpang untuk menggunakan transportasi udara.
- Pihak maskapai diharapkan lebih memperbanyak promosi baik menggunakan promosi/ iklan media cetak maupun media elektronik. Promosi yang menarik, akan meningkatkan keputusan penumpang dalam membuat keputusan menggunakan moda angkutan udara

#### 2. Penyeberangan

- Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada saat mudik lebaran, natal dan Tahun baru, kapal lambat Ferry ASDP, pelayaran ditambah dari tiga menjadi empat trip dalam satu hari. Demikian juga untuk kapal cepat Express Bahari. Keduanya melayani pelayaran empat trip dari Banda Aceh ke Sabang, atau sebaliknya.
- Dengan adanya penambahan trip itu, seluruh penumpang mampu terangkut dari pelabuhan, baik dari Banda Aceh ke Sabang, maupun sebaliknya. Tetapi, untuk pelayaran mobil, mereka harus antre.

#### 3. Terminal

- Sejumlah terminal bus harus mulai representatif dan ramah penumpang, terlebih fasilitas prasarana terminalnya.
- Tahun 2020, sekitar 6 terminal akan direvitalisasi guna melayani angkutan darat yang lebih baik lagi.

- Uji KIR kendaraan wajib hukumnya untuk mobil berpenumpang umum, bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

### 3.1.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

**Tabel 3. 16**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1.	Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan Provinsi	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	38.130.107.378	37.992.339.212	99,6	0,36%
2.	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	Program Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	184.467.221.830	177.163.150.792	96,04	3,96%
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	6.264.786.000	5.805.577.738	92,67	7,33%

Pada sasaran 1, Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 38.130.107.378 dan terealisasi sebesar Rp. 37.992.339.212 atau sebesar 99,6 % dengan tingkat efisiensi sebesar 0,36 %. Dari pencapaian realisasi terlihat bahwa ini menunjukkan realisasinya sudah sangat baik.

Pada sasaran 2, Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dengan program pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan dengan anggaran sebesar Rp. 184.467.221.830 dan terealisasi sebesar Rp. 177.163.150.792 atau 96,04 % dengan tingkat efisiensi sebesar 3,96 %. Dari pencapaian realisasi terlihat menunjukkan bahwa realisasinya sudah baik.

Pada sasaran 2, Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dengan program peningkatan pelayanan angkutan dengan anggaran sebesar Rp. 6.264.786.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.805.577.738 atau 92,67 % dengan tingkat efisiensi sebesar 7,33 %. Dari pencapaian realisasi terlihat menunjukkan bahwa realisasinya sudah baik.

### 3.1.6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Aceh dengan 2 (dua) Sasaran strategis ini didukung oleh 3 (Tiga) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan, adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 17**

**Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Kinerja**

PROGRAM	KEGIATAN
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
	2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
	3. Peningkatan Disiplin Angkutan Umum
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
	2. Pengadaan Marka Jalan
	3. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
	4. Pengadaan Deliniator
	5. Pengadaan Traffic Light
	6. Pembangunan Zona Keselamatan Lalu Lintas
	7. Pengadaan Cermin Tikungan
	8. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan pada Daerah Rawan
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	1. Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
	2. Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut
	3. Pembangunan Sarana Perhubungan Laut
	4. Pembangunan Prasarana Perhubungan Udara
	5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
	6. Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat
	7. Penyediaan Sarana Perhubungan Darat
	8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan
	9. Penyusunan Regulasi Bidang Perhubungan
	10. Pembangunan Sarana Perhubungan Udara

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Aceh pada tahun 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 285.378.642.378,- yang dijabarkan dalam 7 Program dan 44 Kegiatan. Dari anggaran yang terdiri dari Belanja Langsung (BL) terealisasi sebesar Rp. 246.590.743.973,- atau 90,08 % dan Belanja Tidak Langsung (BTL) terealisasi sebesar Rp. 17.490.807.629,- atau 80,21 %.

Sedangkan dari 7 Program dan 44 Kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok hanya 3 program dan 21 kegiatan dengan besar anggaran Rp. 228.862.115.208,- atau 80,20 % dari total anggaran, dan yang terealisasi sebesar Rp. 220.961.067.742,- atau 96,12 % dari target anggaran strategis.

Aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai sasaran strategis pada kegiatan di Dinas Perhubungan Aceh dengan dukungan pembiayaan yang memadai akan mewujudkan pelayanan perhubungan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk peningkatan pelayanan, mobilitas, aksesibilitas serta informasi pada masyarakat di Provinsi Aceh.

Secara umum, alokasi dana yang disediakan oleh Pemerintah Aceh tersebut telah dapat dikelola dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan persentase realisasi keuangan yang hampir mencapai 100% dan realisasi fisik yang hampir mencapai 100% dan Program dan kegiatan seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, dana yang dialokasikan sudah digunakan seefektif dan efisien mungkin untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Aceh.

Realisasi keuangan dan fisik Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2019 secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.18 sebagai berikut ini :

**Tabel 3.9**  
**Capaian Sasaran Strategis Tahun 2019**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)	BOBO T	REALISASI		
				FISIK	KEUANGAN	
				%	Rp.	%
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>	<b>6.264.786.000</b>	<b>2,20</b>	<b>93,57</b>	<b>5.805.577.738</b>	<b>92,67</b>
	a. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	2.699.656.000	0,95	92,32	2.492.200.636	92,32
	b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	1.050.000.000	0,37	97,26	1.021.182.600	97,26
	c. Peningkatan Disiplin Angkutan Umum	2.515.130.000	0,88	91,14	2.292.194.502	91,14
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS</b>	<b>38.130.107.378</b>	<b>13,36</b>	<b>98,67</b>	<b>37.992.339.212</b>	<b>99,64</b>
	a. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	10.423.718.728	3,65	91,80	10.362.364.397	99,41
	b. Pengadaan Marka Jalan	2.234.606.208	0,78	100	2.234.583.555	100
	c. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	14.665.240.999	5,14	99,71	14.612.997.325	99,64
	d. Pengadaan Delinator	996.249.000	0,35	100	994.218.000	100
	e. Pengadaan Traffic Light	2.611.897.841	0,92	100	2.608.763.735	100
	f. Pembangunan zona keselamatan lalu lintas jalan	774.490.200	0,27	100	774.490.200	100
	g. Pengadaan Cermin Tikungan	3.126.416.503	1,10	97,88	3.117.337.000	99,71
	h. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan pada Daerah Rawan	3.297.487.899	1,16	100	3.287.585.000	100
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</b>	<b>184.467.221.830</b>	<b>64,64</b>	<b>88,27</b>	<b>177.163.150.792</b>	<b>96,04</b>
	a. Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas	15.847.798.500	5,55	99,58	15.682.224.871	98,96
	b. Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut	28.028.072.340	9,82	67,98	25.032.326.459	89,31
	c. Pembangunan Sarana Perhubungan Laut	94.242.698.000	33,02	87,54	91.081.584.779	96,65
	d. Pembangunan Prasarana Perhubungan Udara	5.391.965.950	1,89	97,09	5.317.109.322	98,61
	e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.632.535.000	0,57	88,68	1.447.694.996	88,68
	f. Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat	8.314.780.000	2,91	95,77	8.182.199.990	98,41
	g. Penyediaan Sarana Perhubungan Darat	28.524.518.140	10,00	90,43	28.184.802.447	98,81
	h. Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan	1.087.183.900	0,38	100	1.074.470.000	98,83
	i. Penyusunan Regulasi Bidang Perhubungan	922.320.000	0,32	94,10	867.911.256	94,10
	j. Pembangunan Sarana Perhubungan Udara	475.350.000	0,17	61,60	292.826.672	61,60
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>228.862.115.208</b>	<b>80,20</b>	<b>93,50</b>	<b>220.961.067.742</b>	<b>96,12</b>

Dari Rp. 285.378.642.378,- anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perhubungan Aceh atau sebesar 80,20 %, dan senilai Rp. 220.961.067.742,- digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Aceh. Sedangkan sisanya sebesar 19,80 % digunakan untuk membiayai program dan kegiatan rutin dan administrasi perkantoran.

Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 285.378.642.378,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 264.081.551.602,- atau 92,54 %. Hal ini menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi keuangan pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 72,24 % seperti ditunjukkan pada tabel 3.19.

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2018 dengan 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Alokasi Anggaran</b>	<b>Realisasi Keuangan</b>	<b>%</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	228.444.862.858	165.021.230.947	72,24
2019	285.378.642.378	264.081.551.602	92,54

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2019 telah dijabarkan berbagai program dan kegiatan dalam upaya optimalisasi pelayanan mendukung visi misi Pemerintah Aceh.

Akhirnya, semoga LKj ini menjadi landasan dan pendorong bagi Dinas Perhubungan Aceh dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

#### **4.2 KESIMPULAN**

Dalam mencapai akuntabilitas kinerja yang maksimal, Dinas Perhubungan Aceh terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi sebaik mungkin dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Aceh secara optimal melalui pelayanan transportasi. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya terdapat 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, walaupun belum semua dapat terealisasi dengan maksimal.

1. Keseluruhan anggaran yang tersedia untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang mendukung kegiatan strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp. 285.378.642.378,- terealisasi sebesar Rp. 264.081.551.602,- atau **92,54 %** dengan sisa anggaran sebesar Rp. 21.297.090.776,- tidak dapat direalisasikan penggunaan dananya dan selebihnya sisa kas dalam bentuk tunai telah dikembalikan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Aceh.
2. Sasaran strategis kinerja Dinas Perhubungan Aceh dari 7 Program dan 44 Kegiatan yang menjadi ukuran capaian kinerja tahun 2019 dengan 2 (dua) Sasaran strategis ini didukung oleh 3 (Tiga) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan.

3. Pada sasaran 1, Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 38.130.107.378 dan terealisasi sebesar Rp. 37.992.339.212 atau sebesar 99,6 % dengan tingkat efisiensi sebesar 0,36 %. Dari pencapaian realisasi terlihat bahwa ini menunjukkan realisasinya sudah sangat baik.
4. Pada sasaran 2, Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dengan program pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan dengan anggaran sebesar Rp. 184.467.221.830 dan terealisasi sebesar Rp. 177.163.150.792 atau 96,04 % dengan tingkat efisiensi sebesar 3,96 %. Dari pencapaian realisasi terlihat menunjukkan bahwa realisasinya sudah baik.
5. Pada sasaran 2, Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dengan program peningkatan pelayanan angkutan dengan anggaran sebesar Rp. 6.264.786.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.805.577.738 atau 92,67 % dengan tingkat efisiensi sebesar 7,33 %. Dari pencapaian realisasi terlihat menunjukkan bahwa realisasinya sudah baik.
6. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 secara umum telah terlaksana secara baik dan lancar dengan alokasi anggaran Rp. 228.862.115.208,- dan terealisasi sebesar Rp. 220.961.067.742,- atau capaian **96,12 %** atau dengan nilai tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**

#### **4.3 UPAYA DI MASA MENDATANG**

Pencapaian yang telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2019 termasuk kategori sangat baik dan diharapkan kedepannya dapat lebih ditingkatkan mengingat ada beberapa indikator kinerja dengan hasil yang masih kurang memuaskan seperti pada sasaran peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan Provinsi dikarenakan faktor penyusutan.

Upaya-upaya perbaikan dan peningkatan akan terus dilakukan kedepan antara lain dengan mengganti fasilitas keselamatan jalan dengan fasilitas yang baru seperti daun Rambu, Guardrail dan Marka. Juga melakukan sosialisasi terhadap pentingnya

fasilitas keselamatan jalan untuk mengurangi tingkat angka kecelakaan lalu lintas dengan tidak merusak atau mencuri fasilitas keselamatan jalan tersebut serta melakukan pemeliharaan, agar dapat bertahan sesuai umur penyusutan.

Unsur keselamatan pada semua moda transportasi harus diutamakan. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah mematuhi aturan yang berlaku. Semua moda transportasi harus meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Rampcheck dan kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam menggunakan angkutan umum adalah yang terpenting.

Lampiran 1. Pengukuran Kinerja 2019

**PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2019**

SKPA : DINAS PERHUBUNGAN ACEH

TAHUN ANGGARAN : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi	Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, warning light, delineator, dan	70%	67,22%	96,03%
2	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	Persentase peningkatan arus barang dan penumpang	2,6%	11,60%	446%

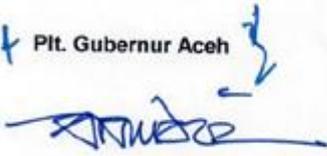
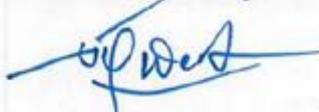
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS PERHUBUNGAN ACEH</b>			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi	Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, warning light, delineator, dan guardrail)	70%
2	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	Persentase peningkatan arus barang dan penumpang	2,60%

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp 6.264.695.000
2 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp 38.751.259.070
3 Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp 218.737.466.825

<p style="text-align: center;">Pit. Gubernur Aceh</p>  <p style="text-align: center;">Ir. NOVA IRIANSYAH, MT</p>	<p style="text-align: center;">Banda Aceh, Januari 2019</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Perhubungan Aceh</p>  <p style="text-align: center;">JUNAIDI, ST, MT</p>
---	--

Lampiran 3. Penghargaan Tahun 2019

**PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2019**

1. Nama Penghargaan : Penghargaan Menuju Informatif  
Kategori Peringkat Penghargaan : Cukup Informatif  
Instansi Penilai : KIA (Komisi Informasi Aceh)  
Pejabat Yang Menyerahkan : Ketua KIA



2. Nama Penghargaan : Stand Terbaik  
Kategori Peringkat Penghargaan : Stand Kreatif  
Instansi Penilai : POLDA Aceh  
Pejabat Yang Menyerahkan : Ka. POLDA Aceh



3. Nama Penghargaan : Gerak Jalan 45 Km  
Kategori Peringkat Penghargaan : Juara  
Instansi Penilai : Dinas Pemuda Dan Olahraga  
Pejabat Yang Menyerahkan : Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga



Lampiran 4. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2019

**CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)	REALISASI		
			FISIK %	KEUANGAN	
				Rp.	%
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>	<b>6.264.786.000</b>	93,57	<b>5.805.577.738</b>	92,67
	a. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	2.699.656.000	92,32	2.492.200.636	92,32
	b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	1.050.000.000	97,26	1.021.182.600	97,26
	c. Peningkatan Disiplin Angkutan Umum	2.515.130.000	91,14	2.292.194.502	91,14
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS</b>	<b>38.130.107.378</b>	98,67	<b>37.992.339.212</b>	99,64
	a. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	10.423.718.728	91,80	10.362.364.397	99,41
	b. Pengadaan Marka Jalan	2.234.606.208	100	2.234.583.555	100
	c. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	14.665.240.999	99,71	14.612.997.325	99,64
	d. Pengadaan Delinator	996.249.000	100	994.218.000	100
	e. Pengadaan Traffic Light	2.611.897.841	100	2.608.763.735	100
	f. Pembangunan zona keselamatan lalu lintas jalan	774.490.200	100	774.490.200	100
	g. Pengadaan Cermin Tikungan	3.126.416.503	97,88	3.117.337.000	99,71
	h. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan pada Daerah Rawan	3.297.487.899	100	3.287.585.000	100
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</b>	<b>184.467.221.830</b>	88,27	<b>177.163.150.792</b>	96,04
	a. Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas	15.847.798.500	99,58	15.682.224.871	98,96
	b. Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut	28.028.072.340	67,98	25.032.326.459	89,31
	c. Pembangunan Sarana Perhubungan Laut	94.242.698.000	87,54	91.081.584.779	96,65
	d. Pembangunan Prasarana Perhubungan Udara	5.391.965.950	97,09	5.317.109.322	98,61
	e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.632.535.000	88,68	1.447.694.996	88,68
	f. Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat	8.314.780.000	95,77	8.182.199.990	98,41
	g. Penyediaan Sarana Perhubungan Darat	28.524.518.140	90,43	28.184.802.447	98,81
	h. Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan	1.087.183.900	100	1.074.470.000	98,83
	i. Penyusunan Regulasi Bidang Perhubungan	922.320.000	94,10	867.911.256	94,10
	j. Pembangunan Sarana Perhubungan Udara	475.350.000	61,60	292.826.672	61,60
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>228.862.115.208</b>		<b>220.961.067.742</b>	<b>96,55</b>

Lampiran 5. Penetapan Kinerja Tahun 2019

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi	Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, warning light, delineator, dan guardrail)	70%	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS</b> 1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 2. Pengadaan Marka Jalan 3. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 4. Pengadaan Deliniator 5. Pengadaan Traffic Light 6. Pembangunan Zona Keselamatan Lalu Lintas 7. Pengadaan Cermin Tikungan 8. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan pada Daerah Rawan	<b>38.130.107.378</b> 10.423.718.728 2.234.606.208 14.665.240.999 996.249.000 2.611.897.841 774.490.200 3.126.416.503 3297487899
2.	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi	Persentase peningkatan arus barang dan penumpang	2,60%	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</b> 1. Perencanaan dan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 2. Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut 3. Pembangunan Sarana Perhubungan 4. Pembangunan Prasarana Perhubungan Udara 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6. Pembangunan Prasarana Perhubungan Darat 7. Darat 8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan 9. Penyusunan Regulasi Bidang Perhubungan 10. Pembangunan Sarana Perhubungan Udara  <b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b> 1. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 3. Peningkatan Disiplin Angkutan Umum	<b>184.467.221.830</b> 15.847.798.500 28.028.072.340 94.242.698.000 5.391.965.950 1.632.535.000 8.314.780.000 28.524.518.140 1.087.183.900 922.320.000 475.350.000  <b>6.264.786.000</b> 2.699.656.000 1.050.000.000 2.515.130.000

**Program**

**Anggaran (Rp)**

1. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	184.467.221.830
2. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	6.264.786.000
3. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	38.130.107.378